

## ABSTRAK

Pemerintah daerah di Indonesia dalam melakukan tugasnya menegakan Peraturan Daerah (Perda) dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dimana Satpol PP mendapatkan kewenangan dari peraturan perundang-undangan untuk membantu pemerintah daerah dalam menegakan perda. Wewenang Satpol PP dalam menegakan Perda hanya sebatas tindakan yang bersifat represif non yustisiil, dalam hal ini Satpol PP tidak dapat melakukan upaya paksa terhadap pelanggar Perda, khususnya dalam hal melakukan penahanan. Terdapat beberapa kasus dalam berita dimana Satpol PP melakukan tindakan represif dalam menegakan Perda. Isu hukum penelitian ini yaitu: a. Kewenangan Satpol PP dalam melakukan penahanan untuk menegakan Perda dan b. Upaya hukum yang dapat dilakukan bagi pelanggar Perda yang ditahan oleh Satpol PP. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.

Kewenangan Satpol PP dalam menegakan Perda diatur di berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-undang Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah, serta dalam Peraturan Daerah. Kewenangan Satpol PP dalam melakukan penahanan berpijak pada KUHAP dimana Satpol PP memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan kepada pelanggar Perda apabila telah diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan dalam prosesnya Satpol PP yang telah diangkat sebagai PPNS harus berkoordinasi dengan Penyidik Polri.

**Kata Kunci:** kewenangan satpol pp, penahanan, peraturan perundang-undangan

## ABSTRACT

*The local government in Indonesia in performing its duty to enforce the Regional Regulation (Perda) is assisted by Satpol PP (Satpol PP) Unit, where Satpol PP get the authority from legislation to assist local government in enforcing the local regulation. The authority of Satpol PP in enforcing the law is only a non-judicial repressive action, in this case Satpol PP can not make efforts to force violators of local regulations, especially in the case of detention. There have been several cases in the news where Satpol PP carried out repressive measures in enforcing the law. The legal issues of this research are: a. Satpol PP authority in conducting detention to enforce the law and b. Legal efforts that can be done for violators of local regulations held by Satpol PP. This type of research is legal research with approach of legislation and concept approach.*

*The authority of Satpol PP in enforcing the Perda is regulated in various laws and regulations, ranging from Local Government Act, Ministerial Regulation, Government Regulation, and Regional Regulation. The authority of the Satpol PP in carrying out the detention rests on the Criminal Procedure Code where Satpol PP has the authority to arrest the offenders if it has been appointed as Civil Servant Investigator (PPNS), and in the process Satpol PP which has been appointed as PPNS must coordinate with Police Investigator.*

**Keywords:** police unit pamong praja, detention, legislation